BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam perspektif Providentia Dei menurut John Calvin dan implikasinya bagi Jemaat Ledo, dapat disimpulkan bahwa BPNT memiliki makna yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dapat dipahami dalam terang iman mengenai pemeliharaan Allah. Bagi warga Jemaat Ledo, BPNT merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang memberikan pertolongan nyata dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi. Dalam pengalaman tersebut, sebagian warga jemaat menghubungkan pertolongan yang diterima dengan berkat dan pemeliharaan Allah. Namun, terdapat pula pemahaman bahwa BPNT pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman warga mengenai BPNT tidak sepenuhnya seragam, tetapi berada dalam hubungan antara pengalaman menerima bantuan, kehidupan iman, dan pemahaman mengenai tanggung jawab pemerintah.

Dalam kaitannya dengan diakonia gereja, penelitian ini menunjukkan bahwa BPNT dan diakonia memiliki kesamaan dalam perhatian terhadap kebutuhan hidup manusia, tetapi keduanya memiliki sumber, penyelenggara, serta mekanisme yang berbeda. BPNT merupakan program pemerintah yang diselenggarakan melalui kebijakan dan mekanisme administratif, sedangkan

diakonia merupakan bentuk pelayanan gereja yang diwujudkan melalui perhatian, kunjungan, doa, pendampingan, dan bantuan kepada jemaat. Karena itu, keduanya tidak dapat disamakan atau dicampuradukkan. Meskipun demikian, dalam terang Providentia Dei, keduanya dapat dipandang sebagai bentuk sarana yang berbeda yang dapat digunakan untuk menghadirkan pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Pemahaman ini membantu jemaat melihat bahwa pemeliharaan Allah dapat hadir melalui berbagai sarana kehidupan sehari-hari tanpa menghilangkan perbedaan tanggung jawab antara gereja dan pemerintah.

Pengalaman warga Jemaat Ledo dalam menerima BPNT juga memperlihatkan bahwa bantuan tersebut memberikan manfaat konkret bagi kehidupan penerima. Bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan rumah tangga serta meringankan beban ekonomi keluarga. Kenyataan tersebut dapat dibaca dalam terang pemikiran John Calvin mengenai Providentia Dei yang menegaskan bahwa Allah memelihara ciptaan-Nya melalui berbagai sarana atau penyebab sekunder. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah dan kebijakan sosial dapat dipahami sebagai salah satu sarana yang melaluinya pertolongan bagi masyarakat dapat diwujudkan. Dengan demikian, BPNT dapat dipahami sebagai salah satu sarana yang memungkinkan pemeliharaan Allah dialami secara konkret oleh warga jemaat. Pemahaman tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas yang kritis, sebab BPNT tidak dapat disamakan dengan Allah ataupun secara otomatis dianggap sebagai kehendak Allah dalam seluruh proses pelaksanaannya.

Penelitian ini juga menemukan adanya berbagai persoalan dalam praktik pelaksanaan BPNT, seperti ketidaktepatan sasaran, persoalan pembaruan data,

perubahan kondisi ekonomi penerima, serta pengalaman sosial yang muncul di tengah masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan dalam sistem dan pelaksanaan kebijakan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab manusia yang harus dinilai dan diperbaiki. Karena itu, pengakuan terhadap Providentia Dei tidak berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan program pemerintah harus diterima begitu saja sebagai kehendak Allah. Pemeliharaan Allah justru perlu dipahami bersama dengan tanggung jawab manusia untuk menjalankan kehidupan sosial secara adil, benar, dan bertanggung jawab. Jika BPNT memberikan pertolongan nyata bagi kehidupan masyarakat, hal tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pengalaman pemeliharaan Allah melalui sarana sosial yang tersedia. Sebaliknya, ketika terdapat ketidakadilan, ketidaktepatan, atau kelemahan dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa semuanya merupakan bagian dari pemeliharaan Allah, melainkan perlu dilihat sebagai persoalan manusia yang membutuhkan perhatian dan perbaikan.

Pemahaman tersebut membawa implikasi bagi kehidupan Jemaat Ledo untuk membangun spiritualitas yang tidak hanya bersifat bersyukur, tetapi juga kritis dan bertanggung jawab. Iman kepada Providentia Dei tidak seharusnya membuat jemaat menjadi pasif atau hanya menerima keadaan sebagai sesuatu yang telah ditentukan Allah. Sebaliknya, keyakinan bahwa Allah memelihara kehidupan mendorong jemaat untuk menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga kehidupan, memperhatikan sesama, serta menyuarakan persoalan yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk mendampingi jemaat, memberikan perhatian terhadap mereka

yang mengalami kesulitan, serta mengembangkan diakonia yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mencakup pendampingan dan pemberdayaan. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan sosial secara adil dan bertanggung jawab, sedangkan penerima bantuan tetap memiliki martabat, kemampuan, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.

Dengan demikian, pemaknaan BPNT dalam perspektif Providentia Dei menurut John Calvin bagi Jemaat Ledo dapat dirangkum dalam suatu spiritualitas syukur-kritis. Jemaat diajak untuk bersyukur atas pertolongan yang diterima melalui berbagai sarana kehidupan, termasuk melalui kebijakan sosial pemerintah, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki kepekaan untuk melihat persoalan, mengkritisi ketidakadilan, dan mengambil bagian dalam tanggung jawab sosial. Pemeliharaan Allah tidak menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan manusia, melainkan menjadi dasar untuk semakin menghargai kehidupan dan menjalankan tanggung jawab terhadap sesama. Dengan demikian, BPNT dapat dipahami secara terbatas sebagai salah satu sarana yang melaluinya pemeliharaan Allah dapat dialami secara konkret, sementara seluruh proses dan praktik pelaksanaannya tetap berada dalam ruang tanggung jawab manusia. Pemahaman inilah yang memungkinkan Jemaat Ledo menghayati Providentia Dei bukan hanya sebagai keyakinan tentang Allah yang memelihara, tetapi juga sebagai panggilan untuk hidup dalam rasa syukur, kepedulian, sikap kritis, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Jemaat Ledo diharapkan terus mengembangkan pemahaman tentang pemeliharaan Allah yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga hadir melalui berbagai sarana kehidupan, termasuk pelayanan gereja dan kebijakan sosial pemerintah. Pemahaman tersebut perlu disertai dengan spiritualitas syukur-kritis, sehingga jemaat dapat menerima pertolongan dengan rasa syukur dan menggunakannya secara bertanggung jawab, tetapi tetap memiliki kepekaan terhadap persoalan ketidakadilan, ketidaktepatan sasaran, dan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan bantuan sosial.

Gereja juga diharapkan terus mengembangkan pelayanan diakonia yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pendampingan, kunjungan, doa, penguatan iman, pemberdayaan, serta perhatian terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi jemaat. Dalam hubungan dengan pemerintah, gereja dapat mengambil peran sebagai pendamping dan penghubung ketika jemaat mengalami persoalan terkait bantuan sosial, sekaligus tetap menghormati tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

Pemerintah dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BPNT diharapkan terus memperhatikan ketepatan sasaran, pembaruan data, keterbukaan informasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, warga jemaat penerima BPNT diharapkan memandang bantuan sebagai pertolongan yang menopang kehidupan, bukan sebagai satu-satunya sumber penghidupan, sehingga tetap berusaha, bertanggung jawab, dan memperhatikan sesama. Dengan demikian, pemahaman tentang Providentia Dei tidak berhenti sebagai pemahaman teologis, tetapi diwujudkan dalam kehidupan jemaat melalui rasa syukur, kepedulian, tanggung jawab sosial, dan keberanian untuk bersikap kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan.